STRATEGI KOLABORASI PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA

COLLABORATION STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF FOOD SECURITY IN WEST SUMATRA PROVINCE IN SUPPORTING THE STATE DEFENSE

Muhammad Yusuf Safardan[1], Sulistiyanto[2], Nora Lelyana[3]

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERTAHANAN, FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA[123]

yusufsafardan1998@gmail.com[1], sulis1061@gmail.com[2], nora.unhan@gmail.com[3]

Abstrak - Pembangunan pertahanan nirmiliter bertujuan untuk mengantisipasi ancaman non militer. Perang antara Rusia dan Ukraina menimbulkan beberapa ancaman potensial dan salah satunya adalah krisis pangan. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi sentra produksi pangan komoditas beras di Indonesia sehingga diharapkan dapat menjawab ancaman krisis pangan global melalui program pembangunan ketahanan pangan. Stakeholders dalam kolaborasi pentahelix yang terdiri dari sektor pemerintah, bisnis, akademisi, komunitas dan media telah memberikan kontribusi dalam pembangunan ketahanan pangan. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini untuk menganalisis strategi kolaborasi pembangunan ketahanan pangan provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pertahanan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analitis kualitatif dan dianalisa berdasarkan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Provinsi Sumatera Barat masih dalam kategori daerah dengan ketahanan pangan yang baik dengan menduduki peringkat 8 nasional. (2) Masih terdapat beberapa hambatan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat. (3) Kolaborasi pentahelix menjadi strategi yang baik untuk membentuk pembangunan ketahanan pangan provinsi Sumatera Barat. Maka daripada itu kolaborasi antar stakeholders di provinsi Sumatera Barat perlu diperkuat untuk mengatasi hambatan dalam pembangunan ketahanan pangan agar mampu mendukung pertahanan negara.
Kata Kunci: Ketahanan Pangan, Kolaborasi Pentahelix, Provinsi Sumatera Barat

Abstract *- Non-military defense development aims to anticipate non-military threats. The war between Russia and Ukraine poses several potential threats and one of them is a food crisis. West Sumatra Province is one of the food production centers for the rice commodity in Indonesia, so it is expected to be able to respond to the threat of the global food crisis through a food security development program. Stakeholders in the pentahelix collaboration consisting of the government, business, academia, community and media sectors have contributed to the development of food security. So based on this background this research is to analyze the collaborative strategy for the development of food security in the province of West Sumatra in supporting national defense. This study used a qualitative approach with a qualitative analytical descriptive research design and analyzed based on SWOT analysis. The results of the study show that (1) West Sumatra Province is still in the category of areas with good food security by being ranked 8th nationally. (2) There are still several obstacles to the implementation of food security development in West Sumatra Province. (3) The pentahelix collaboration is a good strategy to shape the development of food security in the province of West Sumatra. Therefore, collaboration between stakeholders in the province of West Sumatra needs to be strengthened to overcome obstacles in the development of food security in order to be able to support national defense.*
Keywords: *Food Security, Pentahelix Collaboration, West Sumatera Province.*

PENDAHULUAN

Pembangunan pertahanan negara tidak hanya berfokus pada pertahanan militer saja, namun juga harus memperhatikan pertahanan nirmiliter. Hal ini dibertujuan agar negara mampu melindungi diri dari ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Ancaman dan gangguan ini muncul dari dalam maupun luar negeri yang bersifat nasional, regional dan internasional dengan aktor negara ataupun non negara, (Hartanto et al., 2013).

Realita yang dihadapi dunia saat ini adalah terjadinya konflik perang antara Rusia dan Ukraina yang menimbulkan hadirnya ancaman - ancaman potensial salah satunya adalah krisis pangan. Salah satu ancaman nonmiliter yang dihadapi oleh suatu negara adalah krisis pangan. *Food Agriculture Organization United Nation* pada tahun 2010 merilis ada sebanyak 925 juta orang yang menderita kelaparan akibat kekurangan pangan. Bahkan *World Food Programme* (WFP) melakukan kampanye besar besaran terkait kerawanan pangan global yang akan terjadi dimasa depan khususnya kepada negara-negara berkembang (Irjayanti, 2018).

Ukraina sendiri merupakan salah satu negara pengekspor gandum terbanyak di Indonesia dan dengan adanya perang yang dihadapi oleh Ukraina ini akan menyebabkan gangguan pasokan gandum dalam negeri yang diterima melalui kegiatan impor. Tidak hanya itu, dengan adanya perang ini tentunya negara selain Ukraina dan Rusia juga akan melakukan proteksi terhadap komoditas pangan strategis lainnya untuk antisipasi pasokan pangan negara mereka yang akan menghadapi perang antara dua negara tersebut. Naiknya harga pangan strategis selain komoditas dari negara Rusia dan Ukraina juga akan menjadi efek domino diperdagangan internasional yang tentunya juga disebabkan oleh perang dua negara tersebut.

Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap ketersediaan pangan dunia. Ketersediaan pangan dunia yang semakin berkurang, berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri. Kelangkaan ini disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk dunia, meningkatnya kualitas hidup manusia, dan berkembangnya industri yang memanfaatkan lahan produktif, sehingga ketersediaan lahan yang semakin sempit, serta berkembangnya industri yang mengurangi lahan produktif. Diperkirakan penduduk dunia krisis pangan, air dan energi berpotensi menjadi pemicu terjadinya konflik. Isu sumber daya strategis tersebut bisa menjadi sumber konflik baru dan mendorong terjadinya benturan kepentingan terutama jika gagal dalam pengelolaannya (Menteri Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

Untuk memenuhi ketahanan pangan negara, Permentan Nomor 05 tahun 2016 menyatakan terdapat tiga subsistem dalam ketahanan pangan yang harus dipenuhi yaitu subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Subsistem ketersediaan berarti tersedianya pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanan. Subsistem distribusi berarti pasokan atau jumlah pangan dapat menjangkau seluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga atau penduduk. Subsistem konsumsi implikasinya adalah setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsinya sesuai kaedah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalannya. Ketika ketiga subsistem tersebut dapat dikelola dengan baik maka terciptalah wilayah yang tahan pangan (Triandini, 2019).

Ketahanan pangan di Indonesia menurut (Suharyanto, 2011) secara komprehensif meliputi 4 subsistem yaitu:

1) Ketersediaan pangan yang cukup baik dalam bentuk jumlah maupun jenis untuk seluruh masyarakat Indonesia
2) Distribusi yang lancar dan merata kesuluruh penjuru wilayah negara
3) Konsumsi pangan yang memenuhi gizi, kualitas dan mutu pangan yang baik
4) Memberikan dampak terhadap status gizi masyarakat

Memiliki letak strategis dan beriklim tropis terhadap penyinaran matahari yang ada sepanjang tahun dapat menjadikan sebuah keunggulan Indonesia dalam hal pertaniannya, (Kurnia, 2020). Dengan semboyan "belum makan namanya jika belum makan nasi" menjadikan beras sebagai komoditas pangan utama di Indonesia. Wilayah yang menjadi sentra produksi beras di indonesia antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Sumatera Barat sendiri menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, menduduki peringkat ke sebelas sebagai penyumbang produksi tanaman padi nasional Selanjutnya berdasarkan data jumlah produksi padi, dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, hanya 7 kabupaten yang bisa dikatakan sebagai sentra produksi padi/beras yaitu Kabupaten Solok, Agam, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Tanah Datar, Lima Puluh Kota dan Pasaman.

Dengan melihat fenomena yang telah dipaparkan diatas, maka dari itu dinas pangan provinsi Sumatera Barat selaku perpanjangan dari pemerintah daerah serta seluruh stakeholders yang ada di provinsi Sumatera Barat harus berinovasi dengan menerapkan berbagai strategi yang unggul untuk menghadapi ancaman krisis pangan tersebut. Kolaborasi Pentahelix mendefinisikan sebagai interaksi bersama dari empat membentuk heliks dari apa yang disebut Quadruplehelix (sektor publik, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil) sedang ditengahi dan diaktifkan oleh heliks kelima (pengusaha/aktivis sosial). Pentahelix framework memberikan orang atau organisasi memainkan peran kunci dalam menghubungkan entitas Quadruplehelix dengan memenuhi fungsi berikut: (1) mentransfer, menerima, dan mengintegrasikan pengetahuan lintas heliks dalam jaringan; (2) membawa lintas jaringan; (3) memupuk kemampuan untuk bekerja sama di antara para pemangku kepentingan dengan mendapatkan dukungan kepemimpinan, menyusun aliansi transformatif, dan bekerja di bawah yurisdiksi yang berbeda; (4) bertindak sebagai 'pembangun jaringan' dengan menyatukan sumber daya, pengguna, dan pengembang; (5) berperilaku sebagai pembawa global praktik terbaik, standar, dan pembelajaran yang dilembagakan seperti melobi, yang diinformasikan oleh, dan pada gilirannya menginformasikan, proyek lokal dan regional yang konkret; dan (6) pada akhirnya, mengenali visi jamak dengan mengatasi tantangan sosial (Calzada, 2021).

Membuat manajemen strategi adalah salah satu pilihan tepat dalam menghadapi permasalahan tersebut karena manajemen strategi merupakan manajemen yang berorientasi pada masa depan dan berdasarkan pada analisis lingkungan internal dan eksternal. Manajemen strategi bertujuan untuk mengkaji proses yang berkelanjutan mulai dari formulasi strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi dalam rangka mengarahkan dan mengendalikan terkait keputusan - keputusan strategi antar fungsi-fungsi manajemen dalam rangka mendukung

pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran organisasi.

Penelitian ini bertujuan dan bermaksud untuk mendeskripsikan kondisi ketahanan pangan provinsi Sumatera Barat, menganalisis bagaimana hambatan pelaksanaan program pembangunan ketahanan pangan provinsi Sumatera Barat dan menganalisis strategi yang dilakukan untuk menghadapi tantangan ketahanan pangan provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pertahanan negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan format desain penelitian deskriptif kualitatif, yang akan memusatkan perhatian kepada masalah- masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Data yang digunaka adalah data primer berdasarkan hasil wawancara dan data skunder melalui studi pustaka. Data yang diperoleh di uji keabsahanannya melalui triangulasi sumber, teknik dan waktu. Hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya mengenai strategi dalam kolaborasi pembangunan ketahanan pangan provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pertahanan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Obyek dalam penelitian ini yaitu provinsi Sumatera Barat dan instansi terkait. Penjelasan provinsi Sumatera Barat dilihat melalui gambaran secara geografi, demografi, serta kondisi lainnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan daerah. Instansi terkait adalah instansi yang dijadikan informan dalam penelitian. Instansi terkait digambarkan secara rinci menggunakan teori kolaborasi pentahelix yang terdiri dari sektor pemerintah (A), bisnis (B), akademisi (C), komunitas (D), dan media (E) yang memiliki pengetahuan terkait kondisi ketahanan pangan provinsi Sumatera Barat. Informan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam table berikut :

Table 1. Informan Penelitian

No	Nama dan Jabatan Informan	Kode Informan
1	Mahyeldi Ansharullah, SP Gubernur Sumatera Barat	A1
2	Yanita Selly Meristika,S.Kom Fungsional Perencana AhliMuda Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	A2
3	Dr. Ferdinal Asmin Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat	A3
4	Kolonel Kav NanangSiswoko, ST Kasi Teritorial Korem 032/Wirabraja	A4
5	Letkol Laut (KH) Zulkarni,S.Ag Kadispotmar Lantamal IIPadang	A5
6	Nesia Utami, SP Asisten Manager Perencanaan Operasional dan Data Pangan Bulog Sumatera Barat	B1
7	Rinold Thamrin Kepala Unit CSR PT SemenPadang	B2
8	Alfred Rusli Staff Perencanaan CSR PTSemen Padang	B3
9	Dr.-Ing. Ir. Uyung Gatot SDinata, M.T Kepala LPPM UniversitasAndalas	C1
10	Hasnah, S.P., DipAgEc., M.Ec., Ph.D. Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Andalas	C2
11	Wengky Purwanto Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Barat	D1
12	Edi Anggota Kelompok Tani Purangan Sakato	D2
13	Yossi Ariesta Manager Keuangan Fiskal dan Humas	E1

Kondisi Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga perekonomian provinsi Sumatera Barat masih didorong oleh sektor pertanian, hal

ini sesuai dengan data BPS dimana pada tahun 2016-2020 sektor pertanian menjadi sektor dengan kontribusi tertinggi setiap tahunnya dengan rata – rata kontribusi sebesar 23,48% setiap tahunnya terhadap PDRB provinsi Sumatera Barat.

Berkaca dengan kondisi saat ini, provinsi Sumatera Barat masih tergolong menjadi daerah yang aman pangan dengan menduduki peringkat 8 daerah tahan pangan secara nasional. Dampak dari krisis global pandemi dan perang antara Ukraina dan Rusia juga belum berdampak langsung kepada provinsi Sumatera Barat. Hal ini juga disepakati oleh setiap informan penelitian dari sektor pemerintah, sektor bisnis dan sektor komunitas yang beranggapan karena kebutuhan pokok atau komoditas pangan utama masyarakat adalah beras dan dengan kemampuan produksi beras di provinsi Sumatera Barat tinggi tidak terlalu berpengaruh kepada ketahanan pangan masyarakat.

Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat

Kerawanan pangan merupakan suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial, provinsi Sumatera Barat sangat rentan sekali terhadap bencana alam, deforestasi hutan dan perubahan iklim memiliki potensi dampak yang besar terhadap ketahanan pangan, terjadinya kejadian iklim ekstrim yang menyebabkan hilangnya produksi tanaman pangan.

Peningkatan harga komoditas pangan dapat berasal dari produsen, namun sumber peningkatan harga keuntungan, aksi spekulasi maupun kompetisi antar pedagang. Tingginya volatilitas harga komoditas yang terjadi selama ini mengindikasikan bahwa faktor distribusi sangat berpengaruh.

Harga pupuk diperkirakan akan terus naik sepanjang tahun 2022. Data *World Bank-Commodity Market Review*, pupuk Urea dan Diamonium Fosfat (DAP) mengalami kenaikan yang signifikan yatu harga DAP mengalami kenaikan sebesar 76,95 persen, sedangkan harga pupuk urea naik hingga sebesar 235,85 persen. Kenaikan harga pupuk nonsubsidi itu disebabkan sejumlah faktor, di antaranya pembatasan eekspor bahan baku yang dilakukan Rusia dan China. Saat ini, Rusia dan China adalah dua negara pengekspor dua jenis bahan baku pupuk NPK, yakni Fosfor (P) dan Kalium (K) terbesar. Selain pembatasan ekspor yang dilakukan Rusia dan China, meroketnya harga pupuk juga diperparah melalui kenaikan harga komoditas dunia yang menjadi bahan baku pembuatan pupuk.

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat mengatakan, masalah yang terjadi tentang ketahanan pangan Sumatera Barat lebih pada terkendalanya pendistribusian komoditas ke daerah lain. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, Sumatera Barat termasuk daerah surplus pangan, namun dalam hal penyaluran komoditas dagang sedikit memiliki masalah. Kendala dalam distribusi ini berhubungan dengan budaya masyarakat Sumatera Barat yang memiliki jiwa berdagang. Masyarakat Sumatera Barat lebih cenderung memasarkan komoditas pangan hasil produksi secara lokal. Artinya komoditas pangan tersebut hanya menjangkau masyarakat di dalam wilayah Sumatera Barat saja. Akibatnya tidak terjadi penyesuaian harga dengan daerah lain, sehingga komoditas Sumatera Barat ini sulit dipasarkan. Selain kendala distribusi, faktor lain yang mempengaruhi keterjangkauan pangan nasional ini yakni

pendapatan yang kecil, tidak tersedianya sarana transportasi serta kurangnya inovasi teknologi.

Dari segi kelembagaan, hambatan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan juga disebabkan oleh adanya oknum aparatur negara yang memanfaatkan kesempatan untuk dimanfaatkan secara individual. Adanya kolaborasi penghancuran ketahanan pangan yang dilakukan oknum mulai dari pemerintah daerah, perwakilan masyarakat daerah, aparat TNI dan POLRI hingga perusahaan swasta dilakukan secara terorganisir. Hal ini dapat dilihat dari fenomena alih fungsi area tanam produktif menjadi area pertambangan mineral atau area perkebunan kelapa sawit. Hal ini terbukti secara riset dan kajian dapat merusak dan menguras kandungan yang ada didalam tanah sehingga akan mengurangi area produksi pangan.

Strategi Pembangunan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat Untuk Mendukung Pertahanan Negara

Dalam mewudjudkan pertahanan negara yang kuat tentunya pembangunan pertahanan nirmiliter juga harus ditingkatkan. Pertahanan nirmiliter dibangun oleh unsur utama dan unsur lainnya diluar kementerian pertahanan dan salah satu pertahanan nirmiliter yang harus dibangun ada pada sektor ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan kunci pembangunan ekonomi nasional sehingga kestabilan ekonomi dapat menjaga keamanan dan pertahanan negara. Kebutuhan pangan yang paling utama di Indonesia terdapat pada komoditas padi. Hal tersebut dikarenakan makanan pokok utama masyarakat Indonesia adalah beras. Salah satu provinsi yang mempunyai potensi besar sebagai daerah penyumbang beras nasional adalah Sumatera Barat. Hal ini didukung dengan sumber daya alam dan kondisi iklim yang baik dan jumlah penduduk yang besar menjadikan provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang berpeluang besar dalam meningkatkan produksi beras. Namun daripada itu, pada dasarnya ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan. Tidak hanya komoditas beras saja yang penting, namun segala komoditas, stakeholders, serta program program yang dilaksanakan juga akan memberikan pengaruh penting terhadap pembangunan ketahanan pangan daerah termasuk provinsi Sumatera Barat

Pembangunan ketahanan pangan mempunyai peranan strategis dalam pembangunan daerah di provinsi Sumatera Barat, karena akses terhadap pangan dan gizi yang cukup merupakan hak yang paling asasi bagi umat manusia, disamping itu kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penentu yang sangat penting bagi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama untuk menopang ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan

Kolaborasi antar stakeholders merupakan jawaban atas solusi permasalahan dalam pembangunan ketahanan pangan. Kolaborasi pentahelix bertujuan untuk memberdayakan otoritas lokal dan regional untuk menemukan pendekatan inovatif dalam pengembangan, pembiayaan, implementasi dan meningkatkan sinergi berkelanjutan dalam rencana aksi. Tujuan utamanya adalah untuk melibatkan dan mendukung otoritas di berbagai tingkatan bersama dengan pemangku kepentingan utama lainnya pada berbagai sektor untuk meningkatkan pengembangan dan implementasi suatu kegiatan.

Pemerintah pada model pentahelix berperan sebagai regulator. Pemerintah berperan sebagai regulator sekaligus

berperan sebagai controller yang memiliki peraturan dan tanggung jawab dalam mengembangkan program ketahanan pangan darah. Akademisi pada model pentahelix berperan sebagai conceptor seperti melakukan standarisasi proses program serta penelitian melalui riset dan mendidik keterampilan sumber daya manusia. Akademisi dalam hal ini merupakan sumber pengetahuan dengan konsep, teori-teori terbaru dan relevan. Bisnis pada model pentahelix berperan sebagai enabler. Bisnis merupakan entitas yang melakukan proses bisnis dalam menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sehingga profit dari kegiatan bisnis bisa dialokasikan untuk melakukan kegiatan pembangunan ketahanan pangan. Komunitas pada model pentahelix berperan sebagai accelerator. Dalam hal ini komunitas merupakan orang-orang yang memiliki minat yang sama dan relevan terkait pembangunan ketahanan pangan. Bertindak sebagai perantara atau menjadi penghubung antar pemangku kepentingan sekaligus evaluator atas program yang berjalan.

Media pada model pentahelix berperan sebagai expender. Media berperan dalam mendukung publikasi dalam promosi dan mengedukasi para viewers sehingga mampu membuat brand image.

Gambar 1. Skema Kolaborasi Pentahelix Pembangunan Ketahanan Pangan

Sumber : Dibuat oleh peneliti berdasarkan konsep Pentahelix Framework Calzada dan Cowie (2021)

Model pentahelix merupakan referensi dalam mengembangkan sinergi antara instansi terkait di dalam mendukung seoptimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan. Hal itu menjelaskan bahwa kolaborasi pentahelix mempunyai peran penting untuk bermain di dalam mendukung tujuan inovasi bersama dan pentahelix berkontribusi terhadap kemajuan sosial ekonomi daerah (Soemaryani, 2016). Setiap sektor memiliki kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman masing masing dalam melaksanakan kegiatan pembangunan ketahanan pangan. Namun dengan adanya kolaborasi tentunya akan terjadi Strategic Fit ketika bersama sama dalam melakukan pembangunan ketahanan pangan. Beberapa hasil analisa peneliti terkait Strategic Fit dalam kolaborasi pembangunan ketahanan pangan:

1) Pemerintah melakukan forum antar stakeholders agar dapat membuat peta program pembangunan ketahanan pangan antar masing masing instansi. Sehingga akan ditemukan sebuah kesamaan visi dalam membangun ketahanan pangan secara gotong royong

2) Sektor bisnis dapat membantu sektor komunitas melalui kekuatan finansial dalam pengembangan program pembangunan ketahanan pangan

3) Sektor akademisi membantu pemerintah dalam membuat konsep program yang terukur dan teruji melalui penelitian dan riset, sehingga inovasi terbaru untuk peningkatan ketahanan pangan masyarakat dapat disosialisasikan oleh pemerintah melalui peran penyuluh pertanian

4) Sektor pemerintah melalui peran dan modal sosial yang dimiliki TNI melakukan pendampingan masyarakat dalam menghadapi masalah internal masyarakat

5) Sektor komunitas membuat evaluasi serta data kebutuhan pelaku

pertanian agar nantinya dapat disampaikan kepada sektor pemerintah agar membuat program yang lebih terarah

6) Sektor media melakukan publikasi atas semua program yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan pangan oleh setiap sektor untuk mengedukasi perkembangan dan kondisi terbaru terkait ketahanan pangan.

Setiap stakeholders harus menjaga hubungan dengan stakeholders lainnya dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan para stakeholders serta melakukan pengungkapan informasi kepada stakeholders terutama pada stakeholders yang mempunyai power, yang memberikan pengaruh besar terhadap stakeholders lainnya. (Chapple & Cownie, 2020).

Pengembangan sektor bahan baku sarana pertanian dalam kondisi saat ini harus menjadi prioritas setiap stakeholders dalam meningkatkan ketahanan pangan provinsi Sumatera Barat. Perhatian khusus yang disampaikan oleh Gubernur terhadap kenaikan harga pupuk untuk pertanian konvensional demi mencukupi kebutuhan pangan masyarakat akibat harga bahan baku pupuk yang diperoleh dari luar menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. Hal ini tentunya tidak bisa diatasi oleh pemerintah saja, namun setiap stakeholders harus mampu untuk mendukung hal tersebut.

Hal ini dapat dimulai dengan melalukan riset atau penerapan inovasi terbaru dalam pengelolaan sisa produksi pada usaha sektor pertanian dan peternakan yang dilakukan oleh sektor akademisi. Membuat pupuk organik yang ramah lingkungan serta murah akan menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat untuk mulai melepas ketergantungan terhadap pupuk kimia. Hal ini juga akan menjadi salah satu faktor untuk memulai pertanian organik yang dari segi manfaat serta kandungan dalam hasil produksi lebih baik dibandingkan pertanian konvensional.

Setelah riset dan inovasi telah dirumuskan dan dikonsepkan oleh pihak akademisi, adopsi riset ini harus mulai ditetapkan oleh pemerintah sebagai fokus kebijakan yang terarah dengan merelokasi anggaran serta pengaplikasiannya dapat diterapkan di beberapa daerah yang memiliki potensi yang mendukung untuk membuat pupuk organik. Sisa hasil pertanian seperti gabah beras, kecambah jagung, atau ampas tahu, kotoran hewan dari peternakan serta sampah buah-buahan tentunya akan menjadi hal yang berharga yang mana sebelumnya adalah bahan yang tidak berguna setelah diproyeksikan menjadi bahan baku pupuk organik. Sektor bisnis tentunya bisa berkontribusi secara finansial untuk mendukung membuat Badan Usaha Miliki Nagari/Desa yang bergerak disektor industri pupuk organik melalui bantuan modal usaha atau pendampingan manajemen.

Ketika hal ini sudah menjadi kebijakan atau produk pemerintah, tentunya komunitas yang bergerak di usaha pertanian harus menerima inovasi yang telah diterapkan ini. Usaha yang dapat dilakukan pemerintah untuk membangkitkan semarak penggunaan pupuk organik adalah melalui penyuluhan pertanian melalui sekolah lapang. Mengubah pemikiran petani yang selama ini bergantung kepada produk pupuk kimia yang berasal dari luar tentunya akan menjadi tantangan tersendiri. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan petani yang lemah dan adopsi atas inovasi baru yang sulit untuk diterima. Dibutuhkan kerjsama antar sektor dalam mematahkan mindset tersebut. Dalam hal ini, sektor media harus dengan sigap dan tanggap untuk mengedusikasi masyarakat tentang program pemerintah dalam pengembangan adopsi penggunaan pupuk

organik di sektor pertanian. Pemberitaan melalui media koran atau pun media sosial mampu menggapai banyak pembaca, sehingga dapat meningkatkan awareness masyarakat akan penting program ini untuk diselenggarakan

Industrialisasi pada sektor pertanian juga mampu untuk mendorong peningkatan produktivitas hasil pertanian termasuk di sektor pangan. Masih kurangnya adopsi teknologi terbaru seperti mesin produksi skala besar, traktor pengolahan tanah berbasis digital, teknologi penyiraman tanaman otomatis, dan mesin dan teknologi terbaru lainnya menjadi faktor yang harus dibenahi oleh setiap stakeholders. Hal ini bertujuan agar target swasembada pangan dapat dicapai dengan adanya peningkatan produksi melalui adopsi inovasi dan penerapan industrialisasi di sektor pertanian. Hal ini juga berkaitan dengan investasi jangka panjang yang mampu menekan harga produksi sehingga nilai tambah dari penjualan hasil panen mampu ditingkatkan

Pada akhirnya program ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketergantungan akan produk luar dalam hal ini adalah pupuk kimia. Sehingga kemandirian masyarakat dalam melakukan produksi dapat tumbuh dan akan tumbuh kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan tentunya adalah tujuan dari terlaksananya kehidupan berbangsa dan bernegara yang tentunya akan menjaga kestabilan suatu bangsa. Pada akhirnya ketahanan pangan akan menjadi salah satu sektor yang menjadi penentu kestabilan tersebut dan akan mendukung pertahanan negara.

KESIMPULAN REKOMENDASI DAN PEMBATASAN

Provinsi Sumatera Barat masih dalam kategori daerah dengan ketahanan pangan yang baik dengan menduduki peringkat 8 nasional. Hal ini dapat dilakukan karena setiap sektor yang ada di Sumatera Barat telah melakukan program pembangunan ketahanan pangan dimasing masing instansi Masih terdapat beberapa hambatan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan dirangkum dalam beberapa poin berikut :

1) Berkurangnya lahan pertanian produktif karena alih fungsi lahan dan alih fungsi komoditi.
2) Kerusakan dan gagal panen yang disebabkan oleh bencana alam seperti kekeringan, banjir dan gangguan produksi lainnya.
3) Masih tingginya proporsi kehilangan hasil karena kesalahan dalam penanganan atau perlakuan hasil panen dan pengolahan serta pemasaran hasil produksi.
4) Belum terpolanya distribusi bahan pangan antar kabupaten atau kota yaitu arus keluar masuk bahan pangan melalui banyak pintu-pintu masuk yang tersebar pada kabupaten atau kota yang berada pada daerah perbatasan dengan provinsi tetangga, sehingga menyulitkan dalam pemantauan distribusi bahan pangan tersebut, hal ini dapat mengakibatkan fluktuasi ketersediaan dan harga pangan.
5) Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), hal ini salah satunya ditandai dengan masih tingginya konsumsi beras penduduk provinsi Sumatera Barat.

Kolaborasi pentahelix menjadi strategi yang baik untuk membentuk kolaborasi pembanguanan ketahanan pangan provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pertahanan negara yang mampu saling mendukung satu sama lain kelemahan serta memanfaatkan peluang yang dimiliki dimasing masing sektor.

Penelitian ini memberikan saran kepada setiap stakeholders yang terkait dalam program pembangunan ketahanan pangan untuk meningkatkan sinergitas serta awareness terhadap pelaksanaan program. Contohnya saja dalam pembangunan industri pupuk organik yang dapat dibangun melalui kerjasama masing-masing sektor sehingga dapat dilaksanakan secara maksimal dan terarah.

DAFTAR PUSTAKA

Calzada, I. (2021). Smart City Citizenship. Elsevier.

Chapple, C., & Cownie, F. (2020). Teori – Teori dalam Pengungkapan Informasi Corporate Social Responbility Perbankan. Jurnal IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 1(2), 274–282.

Hartanto, A., Midriem, M., Saputra, H. M., Subekti, R. A., Susanti, V., Nugraha, A. S., & Rinjanto, E. (2013). Kajian Kebijakan Alutsista Pertahanan dan Keaman Republik Indonesia (Vol. 7, Issue 1). LIPI

Press.Indrawan, R. M., & Widiyanto, B. (2016). Offset Policy in Building State Defense Independence. Jurnal Pertahanan, 6(2), 29–50.

Irjayanti, D. R. (2018). Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan melalui Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah. Universitas Brawijaya.

Menteri Pertahanan Republik Indonesia. (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 tahun 2016 tentang Pangan, Pertanian dan Perternakan

Soemaryani, Imas. (2016). Penta Helix Model To Increase Tourist Visit To Bandung And Its Surrounding Areas Through Human Resource Development. Journal. Academy of Strategic Management. Volume 15, Special Issues 3

Suharyanto, H. (2011). Ketahanan Pangan. Sosial Humaniora, 4(2), 186–194. http://iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/633/355

Triandini, P. (2019). Strategi dinas pangan kota padang dalam pemberdayaan lumbung pangan masyarakat. Universitas Gadjah Mada.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara